



Pengaruh Restribusi Daerah, Pajak Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia

Muhammad

Universitas Samudra
muhammadsyis71@email.com

Safuridar

safuridar@unsam.ac.id
Universitas Samudra

yanirizal@unsam.ac.id

Yanirial

Universitas Samudra

Jl. Prof. Dr. Syarif Thayeb, Meurandeh Teungoh, Langsa, Aceh, 24416

Abstrak : *This study focuses on discussing the influence of regional levies, regional taxes and general allocations on economic growth in Indonesia. Economic growth is a reference for aggregate economic progress, economic growth shows an increase or increase in the production of goods and services in an economy, specifically in Indonesia, which is also influenced by economic growth indicators that influence economic progress in Indonesia. This research aims to see and find out the influence of regional levies, regional taxes and general allocations on economic growth in Indonesia. This research is a type of quantitative research and secondary data with time series data for 2009 - 2023 sourced from the Indonesian Central Bureau of Statistics and also uses *evIEWS* as a tool to calculate the results of the processed data, using the multiple linear regression analysis method. The results obtained from this research show that the tax retribution variable has a positive but not significant effect on economic growth in Indonesia, the regional tax variable has a positive but not significant effect on economic growth in Indonesia and the general allocation fund variable has a positive but not significant effect on economic growth in Indonesia.*

Keywords: *general allocation funds, regional taxes, economic growth, regional levies*

Abstrak: Penelitian ini berfokus untuk membahas pengaruh dari Restribusi daerah, pajak daerah dan dana alokasi umum terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pertumbuhan ekonomi merupakan acuan dari kemajuan perekonomian secara agregat, pertumbuhan ekonomi menunjukkan peningkatan atau kenaikan dalam produksi barang maupun jasa dalam suatu perekonomian tepatnya di Indonesia, dimana juga dipengaruhi oleh indikator-indikator pertumbuhan ekonomi yang mempengaruhi kemajuan ekonomi yang ada di Indonesia. Pada penelitian ini bertujuan untuk melihat dan meneliti pengaruh Restribusi daerah, pajak daerah dan dana alokasi umum terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pada penelitian ini berjenis penelitian kuantitatif dan data sekunder dengan jenis data time series tahun 2009 -2023 yang bersumber dari Badan Pusat Statistik Indonesia juga menggunakan *evIEWS* sebagai alat hitung hasil olahan datanya, dengan menggunakan metode analisis regresi linier berganda. Hasil yang didapatkan dari penelitian ini pada variabel restribusi pajak berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia, pada variabel pajak daerah berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia dan pada variabel dana alokasi umum berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Kata Kunci: *dana alokasi umum, pajak daerah, pertumbuhan ekonomi, retribusi daerah*

PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi hingga kini masih digunakan sebagai acuan kemajuan perekonomian secara agregat, pertumbuhan ekonomi menunjukkan peningkatan atau kenaikan dalam produksi barang maupun jasa dalam suatu perekonomian tepatnya di Indonesia. (nuraini, 2017).

Seiring dengan perkembangan zaman yang semakin maju seperti saat ini, banyak aspek aspek kehidupan yang juga mengalami kemajuan, terkhusus dengan kemajuan perekonomian yang ada di Indonesia dimana dilandasi oleh indikator-indikator pertumbuhan ekonomi yang mempengaruhi kemajuan ekonomi.

Ditetapkannya UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dimana setiap pemerintah daerah memiliki wewenang dalam mengatur dan mengelola urusan rumah tangganya. Wewenang tersebut dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk melakukan pembangunan ekonomi yang merata dan berkelanjutan disetiap wilayahnya. Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses peningkatan secara total dan maksimal dari pendapatan perkapita penduduk dengan cara mempertimbangkan tidak hanya dari pertumbuhan penduduk, tetapi juga dari perubahan yang mendasar dalam struktur ekonomi negara dan pemerataan pendapatan penduduk dalam jangka waktu yang lama (Rapanna & Sukarno, 2017). Menurut Nuraini (2017) pertumbuhan ekonomi menunjukkan peningkatan dalam produksi barang ataupun jasa dalam suatu perekonomian, sehingga pertumbuhan ekonomi yang merupakan salah satu indikator penting dalam melakukan suatu analisis pembangunan ekonomi. Hal ini dapat dilihat dari tabel 1 berikut yang menunjukan laju pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada tahun 2019-2023:

Tabel 1. Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia per %

<i>Tahun</i>	<i>Pertumbuhan ekonomi</i>
2019	3,82
2020	1,6
2021	-2,1
2022	3,1
2023	5,3

Sumber: badan pusat statistik

Pertumbuhan ekonomi yang tercatat juga berfluktuasi, dari 1,6% pada tahun 2019, mengalami penurunan signifikan menjadi -2,1% pada tahun 2020 akibat pandemi global, hingga kembali meningkat menjadi 5,3% pada tahun 2022. Dinamika ini menunjukkan adanya hubungan antara kontribusi pendapatan daerah dan pertumbuhan ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami fluktuasi setiap tahun nya yaitu seberapa banyak penerimaan dana yang diterima oleh provinsi yang bersumber dari pajak daerah restribusi, hasil kekayaan yang dipisahkan dan lain lain. dimana hal ini yang paling dominan disebabkan oleh pajak daerah yang tidak stabil sehingga pertumbuhan ekonomi mengalami fluktuasi setiap tahun nya berikut tabel 2 menunjukan perkembangan Restribusi daerah yang terjadi di Indonesia:

Tabel 2. Restribusi daerah di indonesia per milyar rupiah

<i>Tahun</i>	<i>Restribusi daerah</i>
2019	9.790,45
2020	8.410,25
2021	8.481,22

2022	8.530,69
2023	8.315,47

Sumber: Direktorat jenderal perimbangan keuangan

Retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang dihasilkan dari pungutan atas pelayanan tertentu yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat. Dalam periode 2019-2023, penerimaan retribusi daerah menunjukkan tren yang menurun, dari Rp9,790.45 juta pada tahun 2019 menjadi Rp8,315.47 juta pada tahun 2023. Penurunan ini dapat berdampak pada kapasitas pemerintah daerah dalam menyediakan layanan publik yang berkualitas. Meskipun kontribusi retribusi terhadap pendapatan daerah relatif kecil, penurunan ini tetap berpotensi memengaruhi pertumbuhan ekonomi secara tidak langsung melalui pengurangan investasi pada sektor pelayanan publik yang mendukung kegiatan ekonomi masyarakat (BPS, 2023) .

Tabel 3 Pajak daerah di indonesia per miliar rupiah

<i>Tahun</i>	<i>Pajak daerah</i>
2019	208.938,20
2020	179.170,49
2021	199.306,00
2022	238.828,92
2023	232.196,24

Sumber: Direktorat jenderal perimbangan keuangan

Pajak daerah merupakan komponen utama pendapatan asli daerah dan memiliki kontribusi besar terhadap kemampuan fiskal pemerintah. Dalam periode yang sama, penerimaan pajak daerah terus meningkat, dari Rp208,938.20 juta pada tahun 2019 menjadi Rp232,196.24 juta pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan adanya upaya optimalisasi dalam pengelolaan pajak daerah. Peningkatan penerimaan pajak daerah dapat mendorong pertumbuhan ekonomi melalui alokasi dana yang lebih besar untuk pembangunan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi lokal, dan peningkatan daya saing wilayah. Namun, efektivitasnya juga sangat bergantung pada kebijakan dan kualitas pengelolaan anggaran oleh pemerintah daerah (BPS,2023).

Tabel 4 Dana Alokasi Umum di indonesia per miliar rupiah

<i>Tahun</i>	<i>Dana Alokasi Umum</i>
2019	420.952,34
2020	381.612,48
2021	377.791,39
2022	398.029,63
2023	398.029,60

Sumber: Direktorat jenderal perimbangan keuangan

Dana alokasi umum (DAU) adalah transfer dana dari pemerintah pusat ke daerah yang bertujuan untuk mendukung pemerataan kemampuan fiskal antarwilayah. Berdasarkan data, DAU cenderung stabil selama periode 2019-2023, berada di kisaran Rp377,791.39 juta hingga Rp398,029.60 juta. Dana Alokasi Umum memberikan peran penting dalam mendukung operasional pemerintah daerah, terutama di wilayah dengan kapasitas fiskal rendah. Stabilitas DAU mencerminkan keberlanjutan dukungan fiskal dari pemerintah pusat, yang berkontribusi pada pembangunan daerah dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Namun, perlu dipastikan bahwa alokasi DAU digunakan secara efisien untuk mendorong produktivitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat (BPS, 2023).

KAJIAN TEORITIS

A. Retribusi daerah

Menurut UU No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU No. 34 Tahun 2000 dan terakhir 26 diubah dengan UU No. 28 Tahun 2009, yang dimaksud dengan Retribusi Daerah: Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

B. Pajak daerah

Pajak menurut Pasal 1 UU No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan umum dan tata cara perpajakan adalah: Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

C. Dana alokasi umum

Menurut Darise (2009) menjelaskan bahwa dana alokasi umum (DAU) adalah dana yang berasal dari APBN dan didistribusikan kepada pemerintah daerah untuk mengatasi ketidakseimbangan keuangan daerah. Dana alokasi umum merupakan sarana untuk mengatasi ketimpangan fiskal antar daerah dan diisi lain juga memberikan sumber pembiayaan daerah.

Sidik (2003) mendefinisikan Dana Alokasi Umum (DAU) sebagai salah satu komponen dana perimbangan pada APBN yang pengalokasiannya didasarkan atas konsep kesenjangan fiskal atau celah fiskal yaitu selisih antara kebutuhan fiskal dengan kapasitas fiskal Dana alokasi umum merupakan sarana untuk mengatasi ketimpangan fiskal antar daerah dan diisi lain juga memberikan sumber pembiayaan daerah.

Dana alokasi umum yang diberikan kepada daerah ditetapkan sekurang-kurangnya 25% dari penerimaan dalam negeri yang ditetapkan dalam APBN. Dana Alokasi Umum untuk daerah provinsi dan Kabupaten/Kota ditetapkan masing-masing sebesar 10% dan 90%. Menurut Kusnandar & Siswanto (2012) dana alokasi umum lebih diprioritaskan untuk daerah yang mempunyai kapasitas fiskal yang rendah.

D. Pertumbuhan ekonomi

Menurut Simon Kuznets dalam (Todaro,2000:144), pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan kapasitas dalam jangka panjang dari suatu negara yang bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya. Kenaikan kapasitas itu sendiri ditentukan atau dimungkinkan oleh adanya kemajuan atau penyesuaian teknologi, intitusional, dan ideologis terhadap berbagai keadaan yang ada.

Sukirno (2013:9) menyatakan bahwa Pertumbuhan Ekonomi adalah proses kenaikan output perkapita yang terus menerus dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi tersebut merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan. Dengan demikian makin tingginya pertumbuhan ekonomi biasanya makin tinggi pula kesejahteraan masyarakat, meskipun terdapat indikator yang lain yaitu distribusi pendapatan. Pertumbuhan ekonomi mendorong pemerintah daerah untuk mendorong pembangunan ekonomi dengan mengelola sumber daya yang ada dan bekerja sama dengan masyarakat untuk menciptakan lapangan kerja baru, sehingga mempengaruhi perkembangan kegiatan ekonomi di daerah (Djadjuli, 2018).

METODE PENELITIAN

A. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan analisis regresi data panel untuk mengetahui pengaruh dari retribusi daerah, pajak daerah dan dana alokasi umum terhadap Pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Penelitian ini berusaha menganalisis pengaruh dari Retribusi Daerah, Pajak Daerah dan Dana Alokasi Umum. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan jenis data time series tahun 2009 -2023. Sumber data diperoleh Badan Pusat Statistik Indonesia. Teknik analisis yang digunakan yaitu Uji Asumsi Klasik (Uji Normalitas, Uji Multikolinearitas, Uji Heteroskedastisitas dan Uji Autokorelasi), Regresi Linear Berganda dan Uji Signifikansi (Koefisien Determinasi (R²), Uji-F dan Uji-t. Selain itu nantinya akan diketahui variabel mana yang memiliki kontribusi paling besar terhadap variabel dependen berupa pertumbuhan ekonomi.

B. Metode Analisis Regresi Linier Berganda

Metode analisis yang digunakan pada penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda. Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengukur pengaruh variabel independen infrastruktur listrik dan infrastruktur sosial variabel dependen pertumbuhan ekonomi. Untuk menguji kelayakan model regresi yang digunakan, maka harus terlebih dahulu memenuhi uji asumsi klasik (Sugiyono, 2013). Secara matematis bentuk persamaan dari regresi linier berganda adalah sebagai berikut:

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e_t$$

Dimana:

Y = Pertumbuhan Ekonomi

A = Konstanta

B = Koefisien Regresi

X₁ = retribusi daerah

X₂ = pajak daerah

X₃ = dana alokasi umum

e = Standar error t = 1, 2, 3, ..., 10 (time series 2009 - 2023)

C. Uji t (Uji Parsial)

Menurut Ghozali (2018:97), Uji t bertujuan secara parsial untuk melihat apakah data berpengaruh variabel bebas (X) terhadap variabel terkait (Y). Uji t dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah seluruh variabel independen secara parsial berpengaruh nyata atau tidak terhadap variabel dependen.

D. Uji F (Simultan)

Uji F digunakan untuk menunjukkan apakah keseluruhan dari variabel bebas atau variabel independen terhadap variabel dependen. Menurut Ghozali (2018:96), uji F (uji serentak) dilakukan untuk mengetahui apakah secara serentak variabel bebas mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap variabel terikat.

E. Koefisien Determinasi (R²)

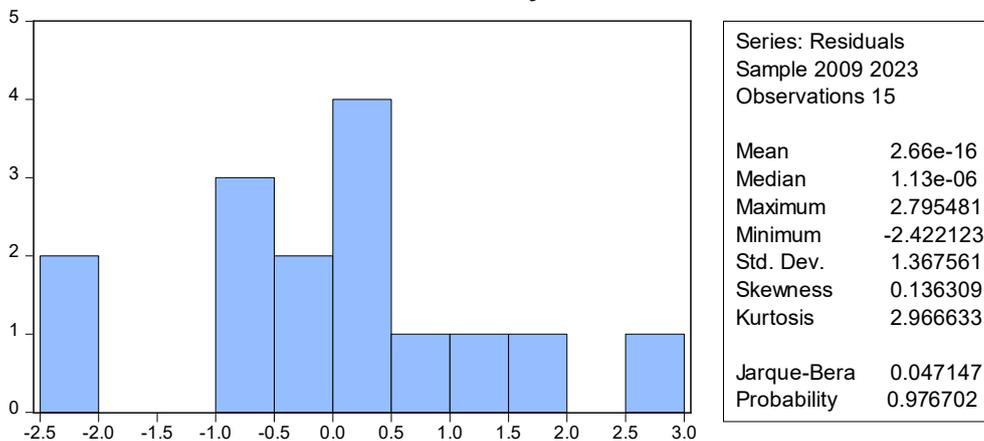
Koefisien determinasi (R²) yaitu koefisien determinasi menunjukkan presentase pengaruh semua variabel independen terhadap variabel dependen. Menurut Ghozali (2018:97), uji koefisien determinasi (R²) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan variabel independen dalam menerangkan variasi variabel dependen.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Tabel 4 Uji Normalitas



Sumber: Eviews

Berdasarkan hasil uji yang ditampilkan pada tabel di atas. Nilai probability jarque-bera sebesar $0,976702 > 0,05$ dapat disimpulkan pada uji ini data terdistribusi secara normal.

2. Uji Multikolinieritas

Tabel 5 Uji Multikolinieritas

Variance Inflation Factors
Date: 11/28/24 Time: 22:44
Sample: 2009 2023
Included observations: 15

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	0.347113	2.187426	NA
PD	0.003220	3.796796	2.270442
RB	3.56E-16	1.854560	1.730923
DAU	0.004590	2.817383	1.856554

Sumber: Eviews

Berdasarkan hasil dari uji multikolineritas yang ditampilkan pada tabel di atas diperoleh bahwa Pajak Daerah (PD), Retribusi Daerah (RD), dan Dana Alokasi Umum (DAU) tidak terdapat multikolineritas karena nilai VIF < 10.

3. Uji Autokorelasi

Tabel 6 Uji Autokorelasi

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic	1.712102	Prob. F(2,9)	0.2344
Obs*R-squared	4.134112	Prob. Chi-Square(2)	0.1266

Sumber: Eviews

Berdasarkan dari uji yang sudah dilakukan bisa dilihat tabel di atas di peroleh bahwa Prob. Chi-Square = 0,1266 > 0,05 yang berarti menunjukkan bahwa tidak terdapat autokorelasi pada uji ini

4. Uji Heteroskedasitas

Tabel 7 Uji eteroskedasitas

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey

F-statistic	5.449929	Prob. F(3,11)	0.0153
Obs*R-squared	8.967047	Prob. Chi-Square(3)	0.0297
Scaled explained SS	4.741826	Prob. Chi-Square(3)	0.1917

Sumber: Eviews

Berdasarkan dari uji yang sudah dilakukan bisa dilihat pada tabel di atas di peroleh bahwa Prob Chi-Square = 0,1917 > 0,05 yang menunjukkan bahwa pada uji ini tidak terdapat heteroskedasitas

B. Uji Regresi Linier Berganda

Tabel 7 Uji Regresi Linier Berganda

Dependent Variable: PE

Method: Least Squares

Date: 11/28/24 Time: 22:36

Sample: 2009 2023

Included observations: 15

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	2.614405	0.589163	4.437489	0.0010
PD	0.111470	0.056743	1.964478	0.0752
RB	3.39E-08	1.89E-08	1.796268	0.0999

DAU	0.075277	0.067751	1.111070	0.2902
R-squared	0.593647	Mean dependent var		4.266667
Adjusted R-squared	0.482824	S.D. dependent var		2.145336
S.E. of regression	1.542817	Akaike info criterion		3.928276
Sum squared resid	26.18314	Schwarz criterion		4.117089
Log likelihood	-25.46207	Hannan-Quinn criter.		3.926265
F-statistic	5.356695	Durbin-Watson stat		1.088648
Prob(F-statistic)	0.016132			

Sumber: Eviews

C. Uji Persial (Uji-t)

Hasil esrimasi diketahui bahwa:

- Nilai probabilitas Pajak Daerah $> 0,05$, yang menunjukkan bahwa secara persial pendapatan asli daerah tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi.
- Nilai probabilitas Retribusi Daerah $> 0,05$, yang menunjukkan bahwa secara persial belanja modal tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi.
- Nilai probabilitas Dana Alokasi Umum $> 0,05$, yang menunjukkan bahwa secara persial dana alokasi umum tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

D. Uji simultan

Diketahui uji F dalam penelitian ini diperoleh sebesar $0,0161 < 0,05$ maka dapat dinyatakan secara simultan bersamaan bahwa variabel independen memberikan pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen secara simultan bersamaan.

E. Uji Kosisien Determinasi (R²)

Diketahui nilai R-squared sebesar 0,5936 maka dapat disimpulkan bahwa sumbangan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan bersamaan sebesar 59,36%. Sedangkan sisanya sebesar 40,64% nya dipengaruhi oleh variabel diluar penelitian ini.

F. Pengaruh retribusi daerah terhadap pertumbuhan ekonmomi

hasil penelitian menunjukkan bahwa retribusi daerah terhadap pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dengan koefisien sebesar $0,339E-08$ dan prob sebesar $0,0999 > 0,05$. Jika terjadi peningkatan retribusi daerah sebesar 1 juta rupiah maka akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,339 persen namun pengaruh ini dinyatakan tidak signifikan. hasil ini menunjukkan bahwa belum sepenuhnya retribusi daerah dialokasikan dengan efektif untuk mendorong aktivitas perekonomian yang produktif.

temuan ini tidak sejalan dengan yang diteliti oleh Prasetyo dan Farid (2012) yang menyatakan bahwa pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

G. Pengaruh pajak daerah terhadap pertumbuhan ekonomi

hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak daerah terhadap pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dengan koefisien sebesar 0,111470 dan prob sebesar $0,0752 > 0,05$. Jika terjadi peningkatan pajak daerah sebesar 1 juta rupiah maka akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,11147 persen namun pengaruh

ini dinyatakan tidak signifikan. hasil ini menunjukkan meskipun peningkatan pajak daerah mendukung pertumbuhan ekonomi, namun kontribusinya belum mampu dalam mendorong pertumbuhan.

Temuan ini tidak sejalan dengan yang diteliti oleh Saragih, (2018) yang mengungkapkan bahwa pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi

H. Pengaruh dana alokasi umum terhadap pertumbuhan ekonomi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana alokasi umum terhadap pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dengan koefisien sebesar 0,075277 dan prob sebesar $0,2902 > 0,05$. Jika terjadi peningkatan dana alokasi umum sebesar 1 juta rupiah maka akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,0752 persen, namun pengaruh ini dinyatakan tidak signifikan. hasil ini menunjukkan bahwa meskipun dana alokasi umum memiliki potensi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, namun kontribusinya belum memberikan dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Temuan ini tidak sejalan dengan yang diteliti oleh Nufitasari et al, (2016) yang menyatakan bahwa dana alokasi umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

KESIMPULAN

Keimpulan yang diambil Penelitian ini menganalisis pengaruh retribusi daerah, pajak daerah, dan dana alokasi umum terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia menggunakan data time series 2009–2023. Hasil analisis menunjukkan bahwa Retribusi daerah memiliki pengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dengan koefisien sebesar 0,339E-08. Pajak daerah juga memiliki pengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dengan koefisien sebesar 0,111470. Dana alokasi umum menunjukkan pengaruh positif yang tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dengan koefisien sebesar 0,075277. Meskipun secara simultan ketiga variabel ini memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi (Prob F-statistic = $0,0161 < 0,05$), secara parsial masing-masing variabel belum memberikan kontribusi signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas pengelolaan retribusi daerah, pajak daerah, dan dana alokasi umum perlu ditingkatkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih produktif.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. (2023). *Retribusi daerah tahun 2019-2023*. Jakarta: Badan Pusat Statistik. Retrieved from <https://www.bps.go.id>
- Darise, N. (2009). *Keuangan daerah: Pendekatan teori, hukum, dan praktik*. Jakarta: Indeks.
- Djadjuli, M. (2018). *Keuangan publik: Teori dan praktik*. Bandung: Refika Aditama.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (2023). *Laporan pajak daerah tahun 2023*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Retrieved from <https://www.djpk.kemenkeu.go.id>

- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 25*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Kusnandar, V. (2012). *Statistik sosial dan ekonomi*. Jakarta: Erlangga.
- Nuraini. (2017). *Pertumbuhan ekonomi di Indonesia: Indikator dan dinamikanya*. Jakarta: Pustaka Ekonomi.
- Nufitasari, I., Sutrisno, B., & Hidayati, D. (2016). Pengaruh dana alokasi umum terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. *Jurnal Ekonomi Daerah*, 5(1), 12–23.
- Prasetyo, E., & Farid, A. (2012). Analisis pengaruh retribusi dan pajak daerah terhadap pertumbuhan ekonomi. *Jurnal Keuangan Daerah*, 7(3), 45–56.
- Rapanna, R., & Sukarno. (2017). Pendekatan strategis dalam pembangunan ekonomi berbasis daerah. *Jurnal Pembangunan Ekonomi*, 8(2), 87–94.
- Saragih, A. (2018). Hubungan pajak daerah dan pertumbuhan ekonomi wilayah. *Jurnal Kebijakan Publik*, 10(2), 34–50.
- Sidik, M. (2003). Peran dana perimbangan dalam meningkatkan perekonomian daerah. *Buletin Keuangan Negara*, 4(1), 25–32.
- Sugiyono. (2013). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukirno, S. (2013). *Ekonomi pembangunan: Proses, masalah, dan dasar kebijakan* (2nd ed.). Jakarta: Kencana.
- Todaro, M. P. (2000). *Economic development* (7th ed.). New York: Addison Wesley.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai.